

**UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT PEMERINTAHAN DESA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI
DI DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Alsar Andri,¹, Rika Ramadhanti,² dan Rosidawati³

^{1,2}Dosen dan ³Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
alsar_andri@yahoo.co.id

ABSTRAK

Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan administrasi sangatlah penting untuk menunjang terciptanya pemerintahan desa yang tertib administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan kemampuan aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa. Tipe dalam penelitian ini adalah survey dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini mengemukakan dua cara dalam peningkatan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan desa yaitu peningkatan keterampilan, pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

Kata Kunci : Pemerintahan desa dan administrasi.

ABSTRACT

Increasing the capacity of village officials in carrying out tasks related to administration is very important to support the creation of an orderly administrative village government. This study aims to determine the efforts to improve the ability of village government officials in carrying out the tasks of village administration. The type in this study is a survey with descriptive explanation level and qualitative data analysis. The results of this study reveal two ways to improve the ability of village officials in carrying out the tasks of village government administration, namely increasing skills, education, training and experience.

Keywords : Village government and administration.

PENDAHULUAN

Administrasi pemerintahan desa memegang rencana yang penting karena desa yang tertib secara administrasi akan mencerminkan terlaksananya segala tugas yang telah diamanatkan kepada desa begitu juga tugas yang telah diamanatkan secara individual kepada perangkat desa. Untuk itu agar tujuan yang telah dicita-citakan desa benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintahan desa yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain

dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan baik secara administratif maupun secara fisik.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Indonesia. Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan terhadap aparat pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang dijelaskan tentang berbagai jenis pembinaan dan pengawasan. Pembinaan administrasi desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem administrasi pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktifitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional.

Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa maka dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. Oleh karena itu pemerintahan kecamatan sangat dituntut untuk turut berperan aktif dalam usaha pembinaan dan pengawasan administrasi yang dilakukan untuk aparat pemerintah desa, sehingga akan terwujud pelaksanaan administrasi yang tertib dan dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan di wilayah pedesaan.

Sukses tidaknya pemerintahan desa sangat tergantung dengan administrasi desa. Administrasi desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas manusia sebagai sumber daya insani dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin artinya administrasi desa sangat menentukan kedudukan pemerintahan desa. Administrasi desa merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah desa karena merupakan fondasi dalam memperkuat

dan mengembangkan pemerintahan desa. Jadi administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah khususnya pemerintah kecamatan.

Salah satu desa yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Beberapa hal menunjukkan bahwa kemampuan aparat Kampung Baru Sentajo dalam pelaksanaan tugas administrasi terutama dalam hal pelayanan umum dirasa belum berjalan secara maksimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengadministrasian yang tertib dan benar. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila kemampuan aparat desa dapat dikatakan mumpuni baik secara kualitas maupun kuantitas.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kemampuan aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007 : 30).

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki

oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta-harta serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. (HAW. Widjaja, 2005 : 93).

Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah yang secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur kewenangan yang terjadi dari hal itu. (Rahmanurrasyid, 2008 : 47).

Menurut Livack dan Sedom desentralisasi administrasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab mengenai fungsi-fungsi administratif publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dalam Wasistiono, 2003 : 2).

Desentralisasi administrasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintahan, dalam banyak hal, tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu Negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstalasi politik yang melakat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa. (Kuncoro, 2004 : 3).

M Solly Lubis mengatakan dalam suatu negara kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat daerah-daerah yang pemerintah daerahnya diberi wewenang mengatur rumah tangga daerahnya itu, yang bisa disebut "swatantra" atau "otonomi. (2005 : 97).

Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintah yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*), sebagai disana terjadi "..., a "superior" government assigns responsibility,

authority, or function to "lower" government unit that is assumed to have some degree of authority." Adanya pembagian kewenangan serta tersediannya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. (2007 : 40).

Administrasi Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa adalah keseluruhan poses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa pada buku Administrasi Desa.

Istilah kemampuan mempunyai banyak makna, Jhonson memberikan definisi (dalam Wijaya, 1991 : 3) berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan.

Kartono (1993 : 13) mengatakan bahwa kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa. Lebih lanjut, Syarif (1991 : 8) menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara lain : kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan atau kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan. Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto (1993 : 36) mengemukakan bahwa kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian survey, penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan berupa kuesioner yang dimaksud di atas untuk disebarkan kepada populasi yang sudah ditentukan. (Singarimbun, 2008 : 3). Adapun tingkat eksplanasi penelitian deskriptif. Eksplanasi deskriptif adalah penggambaran tentang proses mengapa dan bagaimana proses pemecahan suatu permasalahan yang akan diteliti yang saling memiliki hubungan sebab dan akibat. Sedangkan analisa data adalah kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kuantitatif adalah analisa data memakai angka-angka dan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2012 : 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

1. Keterampilan

Keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah

ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Keterampilan/kemampuan tersebut pada dasarnya akan lebih baik bila terus diasah dan dilatih menaikan kemampuan sehingga akan menjadi ahli atau menguasai dari salah satu bidang keterampilan salah satu contoh keterampilan mengoperasikan komputer dalam menjalan tugas administrasi pemerintah.

Sehingga untuk menjadi seorang yang terampil yang memiliki keahlian khusus pada bidang komputer dengan tekun supaya dapat menguasai bidang komputer tersebut dan dapat memahami dan mengaplikasikannya. Ada beberapa pendapat dari aparat desa tentang keterampilan khusus nya keterampilan komputer. Keterampilan komputer akan memudahkan dalam pembuatan surat-menysurat maupun laporan dan sebagainya. Agar pembuatan data-data lebih cepat dalam tugas administrasi pemerintahan.

Paling tidak aparat harus melatih diri dalam keterampilan komputer untuk memudahkan menjalankan tugas masing-masing dengan menggunakan berbagai aplikasi dikomputer tersebut terutama aplikasi Microsoft Office. Agar tugas administrasi pemerintah cepat dikerjakan. Dapat disimpulkan bahwasannya keterampilan menggunakan komputer di era digital sekarang merupakan sebuah kewajiban, dan dapat dipahami bahwa komputer adalah kunci dalam setiap tugas aparat sebagai media informasi, media penyimpanan, membuat persentase menggunakan komputer dan tugas-tugas lain menggunakan komputer, aparat diharus bisa mengoperasikan komputer jika tidak bisa akan diberikan pelatihan guna untuk kelancaran tugas administrasi pemerintah desa.

Keterampilan komputer dapat diperoleh serta diperuntukan bagi apartur pemerintahan desa yang tidak begitu

mahir dalam mengoperasikannya. Hal ini untuk menunjang tugas administrasi yang telah diembankan kepada aparatur pemerintahan desa agar administrasi pemerintahan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keterampilan ini dapat diperoleh melalui belajar otodidak sebagaimana dapat dipelajari melalui tutorial-tutorial di media youtube mengingat secara umum perangkat desa telah berumur sehingga dapat mengurangi rasa enggan belajar lebih lanjut. Hal lain juga yang dapat diusahakan adalah dengan memanggil guru privat komputer untuk mengajarkan khusus kepada perangkat desa yang belum mahir menggunakan computer ataupun bisa dengan membuat pelatihan singkat, apapun namanya yang terpenting untuk kebutuhan mengoperasikan computer minimal dapat menguasai Microsoft Word.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. Pendidikan dapat disimpulkan bahwa bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang lain kepada perkembangan seseorang untuk mencapai tujuan agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Pendidikan sebagai suatu pembelajaran yang tidak tahu apapun menjadi tahu, mengubah sikap dan akhlak di kehidupan sosial bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Pendidikan juga sebagai bimbingan seseorang ke arah yang lebih baik dalam mengalih ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai tujuan hidup dimasa depan dengan pendidikan seseorang bisa mendapatkan pekerjaan

yang diinginkan sesuai cita-cita yang ditentukan.

Kualitas seseorang berada dari pendidikannya, saling membagi pengetahuan dengan orang lain tujuannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan dimasa akan datang terutama kehidupan yang diimpikan pendidikan seseorang mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, semakin tinggi pendidikan semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan semakin luas kepandaian dan mempermudah pengetahuan tentang pekerjaannya.

Setelah memahami makna penting dan maksud pendidikan itu sendiri barulah dapat disimpulkan jika ingin organisasi desa terkhusus desa Kampung Baru Sentajo ingin lebih Berjaya administrasinya dari sebelumnya haruslah diadakan pendidikan dalam hal meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan desa. Sebagaimana yang telah diceritakan sebelumnya dengan pendidikanlah maka orang akan memperoleh keterampilan, dengan ini penting untuk dilakukan pendidikan, sebab jika telah menjadi aparat desa mestinya persoalan pendidikan sudah dipertimbangkan dalam menetapkan aparat desa, jika sudah terlanjur ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memberikan pendidikan kepada aparat desa. Namun yang paling memungkinkan untuk memberikan pendidikan kepada aparat desa yang secara usia mereka sudah di atas rata-rata dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan non formal saja khusus pendidikan dalam administrasi pemerintahan desa, jika keterampilan akan meningkatkan kemampuan keahlian berkomputer, maka pendidikan akan dapat meningkatkan pemahaman untuk beradministrasi desa secara lebih baik.

3. Pelatihan

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada

suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya. Istilah pelatihan sering disamakan dengan istilah pengembangan, perbedaannya jika pelatihan langsung terkait dengan performansi kerja pada pekerjaan yang sekarang, sedangkan pengembangan tidaklah harus. Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini (*current job oriented*). Pengembangan cenderung lebih bersifat formal, menyangkutantisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang.

Pelatihan juga dapat dimaknai sebagai program-program untuk memperbaiki kemampuan melaksanakan pekerjaan secara individual dan kelompok. Pelatihan adalah proses transformasi yang memerlukan beberapa masukan dan pada gilirannya menghasilkan output berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap (pemuahan persyaratan). Pelatihan biasanya berdekatan pada tujuan dan harapan pengembangan sumber daya manusia (yang dalam hal ini adalah aparat pemerintahan desa Kampung Baru Senatjo) pada sebuah organisasi serta erat hubungannya pada tingkat pemahaman yang akan diharapkan.

Dalam sebuah organisasi, aparat yang menduduki sebuah posisi ataupun jabatan tertentu harus memiliki kemampuan dalam menjalankan atau melaksanakan jabatan atau posisi tersebut. Terkadang kemampuan itu tidak sebanding dengan posisi yang diemban, ada pula yang kemampuannya kurang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Hal itu bisa terjadi karena seseorang menduduki jabatan tertentu bukan karena kemampuannya. Maka dari pada itu salah satu solusi yang ditawarkan untuk

mengatasi persoalan ini adalah dengan mengadakan pelatihan.

Pelatihan sebagai sebuah konsep program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Pelatihan (*Training*) adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Pelatihan dilakukan sesuai dengan tingkat kebutuhan pada setiap organisasi, jika mengacu pada kebutuhan yang ada di desa kampung baru sentajo, maka kebutuhan pelatihan yang diperlukan adalah pelatihan dalam meningkatkan kemampuan mengoperasikan komputer dan pelatihan dalam meningkatkan pemahaman beradministrasi.

Pelatihan yaitu memberikan pengajaran atau pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku (pengetahuan, skill, sikap agar mencapai sesuatu yang diinginkan). Pelatihan bagi aparat pemerintahan desa merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai standar.

Pelatihan terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini (*Current job oriented*). Sasaran yang ingin dicapai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini.

Adanya pelatihan yang diadakan akan berkontribusi pada penambahan pengetahuan, memahami pekerjaan yang akan dilakukan untuk meningkatkannya kualitas Sumber Daya Manusia di organisasi tersebut. Maka pelatihan yang dibuat harus mampu meningkatkan

keterampilan komputer paling tidak mengoperasikan Microsoft dan mampu meningkatkan pemahaman mengenai administrasi pemerintahan desa. Pelatihan berbeda dengan pendidikan namun secara umum maksud dan tujuan yang akan dicapai mendekati.

Dirasakan bermamfaat pelatihan yang telah diadakan oleh pemerintahan desa, berbagai pelatihan sebagai melatih diri untuk tugas administrasi supaya adanya peningkatan pemahaman terhadap peraturan yang ada didesa mau pun diperundang-undangan.

Ada beberapa kategori dan model pelatihan yang dilakukan lembaga pemerintah departemen dan non-departemen yang bias dijadikan contoh oleh desa Kampung Baru Sentajo dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan beradministrasi aparat pemerintahannya, di antaranya adalah dalam bentuk : *pre-service training* (pra jabatan), *in-service training* (latihan dalam jabatan) dan *social service training* (latihan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat). Pelatihan-pelatihan tersebut di antaranya berdasar pada konsep kebutuhan jabatan dan atau *self-actualisation*.

Tiga model pelatihan yang sering digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Model Sistem

Model sistem merupakan pelatihan yang mendeskripsikan pelatihan sebagai suatu sistem dimana komponen-komponen saling terkait satu sama lain. Bentuk pelatihan ini diupayakan dari awal tidak terjadi kesalahan, agar pada tahap akhir dapat dipastikan tujuan dari model pelatihan ini berhasil.

b. Model Pengembangan Sistem Pembelajaran (*Instructional system development model*)

Model pengembangan sistem instruksional dibuat untuk menjawab masalah pelatihan. Model ini banyak digunakan sekarang dalam organisasi karena berkaitan dengan kebutuhan

pelatihan terhadap kinerja kerja. Tujuan pelatihan didefinisikan berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan deskripsi pekerjaan, dan atas dasar tujuan pasti kemajuan individu diukur.

c. Model Transisional

Model transisi berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Fokus pada satu titik bahwa organisasi bertujuan untuk mencapai sesuatu setelah waktu tertentu.

4. Pengalaman

Pengalaman merupakan kejadian yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung dan sebagainya) baik yang sudah lama atau baru saja terjadi. Pengalaman bisa berupa yang terpenting dalam pengalaman adalah hikma dan pembelajaran yang bisa diambil. Pengalaman kemungkinan seorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut dengan pengetahuan.

Pengalaman untuk merujuk pada pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengan adanya selama periode tertentu. Seorang dengan cukup banyak pengalaman dibidang tertentu dipanggil ahli.

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerja.

Pengalaman kerja juga sebagai ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

Dilihat dari pengalaman Kepala Desa sangat banyak pengalaman yang telah dilaluinya dalam tugas Adminitrasi Pemerintah dan cukup lama menjabat menjadi pegawai dikantor desa jadi semakin banyaknya peningkat pembangunan desa yang dilakukannya. Dapat dijelaskan pula bahwa pengalaman juga erat kaitannya pada sumbangsih

kemampuan pribadi seseorang, tergantung lama. Semakin lama pengalaman semakin banyak pengetahuan yang didapat, semakin mahir juga seorang aparatur dalam tugasnya.

Telisik pengalaman yang didapat oleh perangkat desa Kampung Baru Sentajo, sudah kenyang makan asam garam, sebagaimana yang telah didapat dalam penelitian ini akan tetapi dalam hal pengadministrasian secara khusus pada dasarnya mereka belum mendapatkan pengalaman secara mendetail, sebab pengelolaan desa di zaman dahulu da sekarnng memiliki tuntutan yang berbeda, jika organisasi desa di zaman dahulu tidaklah memperhatikan unsur administrasi sebagai sebuah kesuksesan organisasi namun lebih kepada penekanan kepemimpinan saja, maka hal itu berbanding terbalik dengan yang diharapkan organisasi di zaman sekarang. Pengalaman kerja merupakan tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya.

Fakto-Faktor Yang Menghambat Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam tugas administrasi pemerintah di desa Kampung Baru Sentajo dapat di diuraikan sebagaimana indikator upaya peningkatan kemampuan yakni : 1. Keterampilan, 2. Pendidikan, 3. Pelatihan dan 4. Pengalaman. Namun selain dari pada yang empat tersebut ada juga hal lain yang menjadi faktornya, sebagaimana diuraikan berikut :

1. Keterampilan

Dalam meningkatkan keterampilan, hal yang perlu dilakukan adalah pelatihan setidaknya. Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan keterampilan adalah faktor usia, sebab rata-rata dari aparat pemerintahan desa mereka didominasi oleh usia tua, yang secara prokduktivitas tentu sangat berbeda dengan usia muda, oleh karenanya motivasi dalam diri untuk berebanah tidaklah sekuat usia muda.

2. Pendidikan

Dikarenakan usia tua yang mendominasi aparat pemerintahan desa, maka hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam upaya peningkatan kemampuan aparat desa. Usia yang tidak lagi muda ditambah dengan tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi dan tuntutan masyarakat yang begitu tinggi sebagai bentuk dinamika masyarakat era globalisasi semakin menambah ketidakserusan dan ketidakmampuan pemerintahan desa dalam beradministrasi. Sehingga faktor usia dan pendidikan yang tidak terlalu tinggi menjadi sebuah masalah, jika disuruh menambah pendidikan maka tidak memungkinkan karena faktor usia.

3. Pelatihan

Secara kuantitas pelaksanaan pelatihan sering dilakukan, akan tetapi minat dan serapan peserta tidaklah teralalu baik dapat menangkap maksud dan tujuan pelatihan yang diadakan, sebab usia dan faktor kesibukan lainnya dari aparat pemerintahan desa, mereka tidak lah terlalu fokus pada sebuah urusan pelatihan saja, namun banyak hal yang harus dilakukan dalam masyarakat. Artinya pelatihan yang diberikan tidak akan teralalu berpengaruh signifikan pada peningkatan kemampuan dalam pengadministrasian pemerintahan desa. Selain itu faktor lain penghambat terlaksana dan kurang maksimalnya pelatihan adalah, sifat yang disebut oleh

pepatah adat melayu Kuantan Singingi “*ikan ogan kakorangan, urang tuo ogan dirondahan*”. Pepatah ini mengisyaratkan tetua-tetua di daerah Kuantan Singingi enggan untuk diajari, dan selama ini *maidset* yang tertanam oleh tetua-tetua pelatihan sebagai bentuk pengajaran kepada mereka.

4. Pengalaman

Secara pengalaman jika dilihat dari data penelitian, aparat pemerintahan desa Kampung Baru Sentajo didominasi oleh usia tua. Ini menandakan bahwasannya pengalaman mereka sudah teruji dan telah mengecap asin garam terlebih dulu, namun pengalaman yang diperoleh bersifat umum untuk sebuah organisasi dan tuntunan sekarang adalah kekhususan dalam mengoperasikan komputer dan tingkat pemahaman administrasi, yang tentunya tidak akan didapat pengalamannya pada masa dimana dikategorikan jauh sebelum zaman digitalisasi.

5. Keterbatasan Biaya

Keterbatasan biaya menjadi penghambat dalam melaksanakan semua kegiatan yang telah diuraikan di atas, tidak memungkinkan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dihabiskan untuk semata-mata upaya peningkatan kemampuan.

6. Tidak Adanya Peran Instansi Terkait

Dimaksud dengan tidak adanya peran instansi terkait adalah, pertama kecamatan yang memiliki tanggung jawab kepada pemerintahan desa dalam hal pembinaan administrasi pemerintahan desa tidak dilakukan secara maksimal. Serta kabupaten yang juga bertanggungjawab atas ketidak seriusan pemerintahan desa dalam mengelola administrasi pemerintahan desa, pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten hendaknya memberikan

pelatihan secara khusus tentang tertib administrasi secara berkesinambungan. Jika hal telah dilaksanakan, maka bolehlah menetapkan *punishman* (hukuman) kepada pemerintahan desa yang telah mendapatkan pelatihan tersebut, agar terciptanya tertib administrasi yang diharapkan. Jangan malash sebaliknya *punishman* (hukuman) dulu baru ada pelatihan, begitu juga selanjutnya bagi pemerintahan desa yang tertib administrasinya sudah dalam kategori baik, maka hendaklah diberikan *reward* (hadiah).

Solusi Ditawarkan Untuk Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing

Untuk mendapatkan solusi atas suatu permasalahan ada beberapa tahapan yang harus dilalui, pertama perlu mengenali apa sebenarnya permasalahan. Setelah jelas masalah dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah. Solusi merupakan cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan.

1. Seleksi Aparat Pemerintahan Desa

Menyeleksi terhadap aparat pemerintahan desa yang akan mengisi formasi di pemerintahan desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya dan terpilihnya aparat pemerintahan desa yang teruji secara kapabilitas.

2. Menempatkan Orang Pada Posisi Yang Tepat

Solusi yang bisa dilakukan dengan cara menempatkan orang pada posisi

yang tepat alias (*the right man on the right place*), ini juga akan membantu mengatasi persoalan dalam hal kemampuan mengisi formasi pemerintahan desa, jangan karena faktor tertentu seseorang dapat mengisi jabatan di desa, tapi benar-benar orang itu layak.

3. Membuat Pelatihan Fokus dan Menuntut Peran Pemerintah Daerah

Hendaknya ada lembaga yang membuat pelatihan fokus pada persoalan administrasi pemerintahan desa, sehingga aparat desa mudah dalam mengupgrade kemampuannya. Selain itu juga, peran pemerintah daerah harus dapat mengayomi desa yang tidak baik dalam administrasi, ini juga dapat dilakukan dengan mengikutsertakan akademisi perguruan tinggi sebagai konsep.

4. Membuat Kerjasama

Kerjasama ataupun yang dimaksud dengan (*Memorandum of Understanding*) merupakan cara dalam mengatasi ketidakmampuan desa dalam melakukan tertib administrasi, kerjasama ini dapat dilakukan dengan Balai Pelatihan terkait, atau dengan perguruan tinggi serta menjadikan desa sebagai subjek binaan perguruan tinggi, hal ini sedikit banyaknya akan membantu persoalan tersebut.

5. Membuat Forum Pemerintahan Desa

Perlu adanya forum antar desa sebagai ajang berbagi, komunikasi, meningkatkan kemampuan desa, serta hal positif lainnya. Bukan malah kebalikannya forum ini sebagai ajang unjuk gigi, sebab forum yang selingkuh dan sesama kabupaten tidak layak dijadikan ajang unjuk gigi. Tapi semangat yang mesti ditanamkan adalah semangat berjuang bersama, untuk lebih baik dari desa-desa yang ada di pulau Jawa yang secara matematis mereka memang lebih

unggul. Semangat inilah yang mesti ditanamkan pada forum-forum desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Solusi Lainnya

Solusi yang bisa diterapkan dalam mengatasi persoalan ataupun hambatan yang dialami secara internal adalah aparat desa harus melakukan pengadministrasian pada setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam artian catat semua yang dilakukan, lakukan semua yang telah dicatat begitu semboyan administrasi mengatakan. Sedangkan yang bersifat eksternal diberikan pemahaman kepada masyarakat agar senantiasa memaksa semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan administrasi. Serta mengajak masyarakat untuk melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan administrasi, sebagai sarana pembiasaan dalam proses administrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya peningkatan kemampuan aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan meningkatkan keterampilan, memberikan pendidikan non formal yang berkaitan dengan tujuan capaian pemerintahan desa yakni tertib administrasi, memberikan pelatihan. Selain itu bisa juga melakukan peningkatan disiplin kerja apartur desa, yang erat kaitannya pada pembentukan pola kerja dan pembiasaan penagarsipan dokumen.

Saran

Untuk lebih meningkatkan kemampuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Desa Kampung Baru Sentajo, khususnya tugas-

tugas administrasi desa, ada beberapa saran pokok yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan disiplin pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran efisien dan efektifitas kerja pegawai guna mencapai pelaksanaan tugas kantor dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi hal ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan desa, sehingga diharapkan untuk kedepannya, Kepala Desa lebih melakukan pengawasan yang ketat terhadap kedisiplinan
2. Selain itu pihak desa harus lebih inisiatif dan kreatif lagi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, melakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi aparat pemerintah desa, dengan maksud agar supaya dari hasil pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam berbagai aspek yang menjadi tugas dan tanggung jawab
3. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah ditingkat desa, baik dukungan berupa bimbingan teknis administrasi maupun pengawasan dan pengendalian.
4. Hendaknya diantara para aparat pemerintahan desa dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling sinergis, memperbaiki pola kerja yang dapat mendukung kearah pelaksanaan tugas sehari-hari, oleh karena itu setiap aparat perlu meningkatkan dedikasi dan komitmennya sebagai abdi masyarakat, abdi Negara dan abdi bangsa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amin Rahmanurrasyid. 2013. *Akuntabilitas dan Transfaransi dalam Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*. Tesis.
- AW Widjaya. 2014. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : Rajawali Press.
- HAW. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indoenesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartini Kartono. 2010. *Pemerintahan dan Kepemimpinan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Mudrajad Kuncoro. 2015. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang)*. Jakarta : Erlangga.
- Masri Singarimbun. Sofian Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES Indonesia.
- Nurcholis Hanif. 2007. *Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Pipin Syarifin. Dedah Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Prijono Tjiptoherianto. 2014. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Prisma.
- Roesli Syarif. 2015. *Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan*. Bandung : Bina Aksara.
- Sadu Wasistiono. Etin Indrayani. Andi Pitono. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan (Melalui Pandangan Teoritik, Legalistik, dan Implementatif)*. Bandung : CV. Fokus Media.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.

Syamsudin Haris (editor). 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah Desentralisasi, Demokratisasi Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta : LIPI Press.